

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012-2017

Afifah Fauziah Amalia N, Haryanto¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze effect of district own revenue, general allocation fund, and capital expenditure on the local financial independen level at the district town in Province of Central Java. This research using a quantitative approach with descriptive of analysis. The sampling technique used in this research is total sampling technique, so that the total sample in this research were 35 districts/cities in Province of Central Java during 2012-2017. This research using a secondary data from The Realization of Regional Budget Reporting that was reported to the Audit Board of Semarang City. The selected analytical method is a multiple linear regression analysis method with hypothesis testing using the T test and significance level of 0.05. The conclusion of the results in this research that is district own revenue has a significant positive effect on the local financial independen level, general allocation funds have a significant negative effect on the local financial independen level, and capital expenditure hasn't effect on the local financial independen level.

Key Words : district own revenue, general allocation fund, capital expenditure, and the local financial independen level.

PENDAHULUAN

Sebelum era reformasi, kondisi keuangan daerah di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya terlepas dari pemerintah pusat di dalam mengatur kebutuhan sendiri daerahnya, hal ini ditunjukkan dengan adanya ketergantungan yang lebih besar terhadap dana alokasi umum (DAU) dibandingkan peningkatan pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan pengelolaan potensi daerah dalam mendanai belanja daerah (Abdullah.,dkk,2015). Kondisi tersebut akhirnya mendorong pemerintah membentuk UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 untuk mengatur pemberian otonomi daerah sebagai bentuk perubahan amandemen Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dijadikan sebagai bentuk perubahan positif dari krisis yang dialami pada tahun 1997-1998 akibat penerapan sistem ekonomi sentralistik yang mengakibatkan ekonomi daerah sangat bergantung pada pusat. Sehingga otonomi daerah memiliki tujuan untuk memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri, terutama dalam bidang perekonomian, karena pemerintah daerah di anggap lebih mengenal apa yang menjadi kebutuhan daerahnya, agar tingkat kesejahteraan meningkat secara merata dengan cepat (Ristanti & Handoyo, 2017).

Di era desentralisasi fiskal ini, pelaksanaan desentralisasi di setiap daerah tidak boleh hanya berfokus pada dana-dana bantuan dari pemerintah pusat seperti dana perimbangan, tetapi lebih penting dari itu daerah harus mampu mengoptimalkan komponen dan kemampuan yang dimiliki sendiri melalui pendapatan asli daerah sehingga daerah secara mandiri mampu mengembangkan potensi yang ada agar kemandirian keuangan bagi daerah dapat terwujudkan. Selain itu, Pemerintah daerah diharapkan akan semakin mengurangi ketergantungannya terhadap

¹ Corresponding author

pemerintah pusat, bukan hanya terkait dengan pembiayaan yang dibutuhkan, tetapi juga terkait dengan kemampuan daerah guna meningkatkan kemandirian daerah (Prakarsa, 2014).

Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dan diukur dari besarnya efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh tiap Pemerintah daerah baik itu pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota (Abdullah.,dkk, 2015) jika dibandingkan dengan dana yang berasal dari pihak luar daerah, seperti dana bantuan dari pemerintah pusat atau dana perimbangan (DAU,DAK,DBH) dan dana pinjaman. Selain itu kemandirian keuangan suatu daerah dapat menunjukkan tingkat pencapaian dan keberhasilan atas kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, mengelola pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Penggunaan dana transfer suatu daerah yang lebih dominan dalam membiayai belanja dan kebutuhan pemerintah daerah, menunjukkan ketidaksiapan daerah dalam bersaing serta dalam memberanikan diri untuk meningkatkan kemandiriannya sekaligus memaksimalkan potensi, sumber, dan kekayaan yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi dana alokasi umum terhadap daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain termasuk pendapatan asli daerah (PAD).

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

1. Otonomi Daerah

Dalam pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta partisipasi masyarakat, adanya pemerataan baik itu pemerataan dalam bidang ekonomi maupun bidang politik disetiap daerah (Mardiasmo, 2004). Selain itu dijelaskan dalam UU No.32 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah pasal 1 ayat 5 dan 6 yang menegaskan bahwa “Otonomi Daerah merupakan wewenang, hak dan kewajiban bagi daerah otonom untuk mengatur, mengelola dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat daerah setempat agar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku” (Verginia, 2017).

Hal ini berarti bahwa otonomi daerah menjadi perwujudan dalam pelaksanaan sistem desentralisasi di Indonesia, yang dimana pemerintah diharapkan mampu mengelola dan mengembangkan yang menjadi potensi untuk dijadikan sumber-sumber PAD sehingga daerah otonom lebih mandiri dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya.

2. Keuangan Daerah

Halim (2002) menjelaskan bahwa keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai kewajiban dan segala sesuatu yang penilaiannya dapat dilakukan dengan uang, demikian pula dengan hal-hal tertentu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan sebagai kekayaan daerah selama belum dimiliki, dikuasai, dan dikelola oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Sistem keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang meliputi hak daerah, kewajiban daerah, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah, dan kekayaan pihak lain, yang dimana ruang lingkup tersebut menjadi batasan dan pemahaman bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keuangan daerah agar efektif dan efisien.

3. Teori Anggaran

Menurut Mahmudi (2010) salah satu jenis sistem anggaran yang digunakan dalam pelayanan sektor publik adalah anggaran kinerja atau performance based budgeting yang dikenal dengan sebutan Value For Money. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasari oleh tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Sedangkan pentingnya anggaran sektor publik dalam buku Mardiasmo (2004) memiliki beberapa alasan yaitu: a) Anggaran merupakan alat terpenting bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin keseimbangan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, b) Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas, c) Anggaran diperlukan untuk menyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran yang dimaksud dalam buku Halim (2002).

Penyusunan APBD difokuskan pada optimalisasi fungsi dan manfaat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang bertujuan bagi tercapainya sasaran atas agenda-agenda pembangunan tahunan yang telah direncanakan sebelumnya oleh aparat pemerintah daerah setempat (Wenny, 2012).

5. Teori Fiscal Federalism

Teori federalisme fiskal merupakan teori yang menjelaskan mengenai hubungan desentralisasi dengan perekonomian, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam berbagai kajian tentang federalisme fiskal (*fiscal federalism*), terdapat dua perspektif teori yang menjelaskan dampak ekonomi dari desentralisasi, yaitu *traditional theories (first generation theories)* dan *new perspective theories (second generation theories)*. Federalisme fiskal menampilkan model normatif yang menggambarkan pemerintah pusat sebagai penafsir arif aspirasi masyarakat, yang memberikan arahan dalam aturan-aturan kelembagaan antar pemerintahan untuk menjamin lembaga-lembaga pemerintah daerah bertindak sesuai keinginan pusat (dengan asumsi sesuai keinginan seluruh rakyat).

Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Melihat penelitian yang dilakukan oleh Ariani (2010) dan Muliana (2009) hasilnya menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Jadi dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah tersebut beserta kontribusi dari masyarakat daerah setempat yaitu berasal pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, penerimaan lain-lain yang sah dan bukan dari pajak atau retribusi (Abdullah., dkk, 2015).

H1: Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam mengurangi terjadinya ketimpangan daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah dengan mempertimbangkan prinsip keadilan.

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2002) menyatakan bahwa sebagian besar APBD masih mengabaikan analisis kinerja keuangan sehingga memunculkan dugaan apakah APBD yang disusun pemerintah daerah sudah efektif atau sebaliknya. Melihat penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

H3 : Belanja Modal berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

1. Kemandirian Keuangan Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, dapat diukur dengan menggunakan salah satu cara yaitu dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan. Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Nabila, 2017).

Sehingga rasio kemandirian daerah dapat menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat kebergantungan suatu daerah terhadap dana bantuan dari pemerintah pusat. Besarnya tingkat kemandirian keuangan daerah dalam penelitian ini dapat diukur dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{PENDAPATAN ASLI DAERAH}}{\text{TOTAL PENDAPATAN TRANSFER}} 100\%$$

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang murni dihasilkan daerah dengan mengoptimalkan sumber potensi dari pengelolaan kekayaan asli daerah dan partisipasi masyarakat daerah yang terdiri dari atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD dan lain-lain PAD yang sah (Virginia, 2017). Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{PENDAPATAN ASLI DAERAH}}{\text{TOTAL PENDAPATAN DAERAH}} 100\%$$

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Dana Alokasi Umum merupakan transfer dari alokasi anggaran APBN pemerintah pusat yang ditunjukkan kepada daerah sebagai dana dukungan untuk membangun sarana dan prasarana dengan tujuan melaksanakan pemerataan kemampuan keuangan tiap-tiap daerah agar tidak terjadi kesenjangan antar daerah di Indonesia. Menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 Pasal 27 Dana alokasi umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada. Dana Alokasi Umum dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{DAU}}{\text{TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH}} 100\%$$

4. Belanja Modal

Pengertian belanja modal adalah pengeluaran atau belanja pemerintah baik pusat maupun daerah yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Hidayat, 2013). Belanja Modal dapat dihitung dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Belanja Modal} &= \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} \\ &+ \text{Belanja Modal Gedung dan Bangunan} \\ &+ \text{Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan} \\ &+ \text{Belanja Aset Tetap Lainnya} + \text{Belanja Aset Lainnya} \end{aligned}$$

Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel pada penelitian ini menggunakan seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Penentuan sampel ditetapkan dengan teknik total sampling, yakni seluruh populasi yang ada dijadikan sebagai sampel. Kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah berjumlah 35 kabupaten/kota, yang berarti sampel yang digunakan juga sebanyak 35

kabupaten/kota selama 6 tahun. Selain itu Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat kepadatan penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 yaitu sebesar 1.053/km².

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/kota yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah atau dapat diakses dalam website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yaitu www.djpk.depkeu.go.id.

Metode Analisis

1. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2018), analisis statistik deskriptif merupakan analisis yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kuortosis, dan swekness (kemiringan distribusi).

2. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test, dengan taraf signifikansi 0,05 atau 5%. Jika signifikansi yang dihasilkan >0,05 maka data terdistribusi secara normal. Sebaliknya jika signifikansi yang dihasilkan < 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW Test). Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel independen (Ghozali, 2018). Nilai Durbin Watson merupakan dasar untuk menentukan apakah telah terjadi autokorelasi atau tidak.

Uji Heterokedasitas

Cara yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SREID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat diasumsikan bahwa data yang diteliti tidak terdapat heterokedasitas.

Uji Multikolinieritas

Dalam penelitian ini pengujian terhadap multikolinieritas dilakukan dengan cara menggunakan nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan nilai Tolerance. Nilai Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih dan yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai VIF dan nilai Tolerance menjadi ukuran yang menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Batas terjadinya multikolinieritas adalah nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0,10. Apabila tolerance value > 0,10 dan VIF < 10 maka dikatakan tidak terdapat terdapat gejala multikolinieritas.

3. Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam menguji hipotesis pada penelitian ini menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square) yang bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antara variabel-variabel penelitian berupa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Data yang terkait diolah menggunakan SPSS dengan menggunakan persamaan rumus regresi sebagai berikut :

$$\text{Ln}Y = \alpha + \beta \text{Ln}X1 + \beta \text{Ln}X2 + \beta \text{Ln}X3 + \epsilon_i$$

Dimana:

Y = Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

X1 = Pendapatan Asli Daerah
 X2 = Dana Alokasi Umum
 X3 = Dana Alokasi Umum
 ϵ_i = Koefisien error atau tingkat kesalahan pengganggu

Uji Signifikan F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikat. Sehingga dengan uji F dapat menjadi dasar dalam pengambilan kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Uji Signifikan T

Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara individual maka dilakukan pengujian dengan uji t. Apabila tingkat signifikansi yang diperoleh (p-value) lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis alternatif dapat diterima atau variabel independen tersebut berpengaruh secara individu terhadap variabel dependennya.

Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen di mana hal ini ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi (R2 adjusted) antara nol dan satu atau $0 < R2 < 1$. Jika R2 mendekati 1, ini menunjukkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat sehingga model yang digunakan dapat dikatakan baik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 35 kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2012-2017. Akan tetapi total sampel tersebut harus dikurangi sebanyak 9 data yang telah diuji secara statistik sebagai data outliers sehingga total sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 201 sampel.

Statistik Deskriptif

Penelitian ini memiliki hasil analisis statistik deskriptif masing-masing variabel yang ditunjukkan pada tabel 4.2, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2
Deskriptif variabel penelitian

		Statistics		
KKD				
N	Valid	201		
	Missing	0		
Mean	0,180855049			
Std. Deviation	0,078449325			
Minimum	0,061272188			
Maximum	0,523071055			
		Statistics		
		PAD	DAU	BM
N	Valid	201	201	201
	Missing	0	0	0
Mean	231.954.197.049,42		852.339.861.905,47	279.645.485.112,99
Std. Deviation	107.681.814.301,75		239.726.379.862,94	134.114.308.804,27

Minimum	77.798.870.961,00	325.710.016.000,00	51.980.727.019,00
Maximum	648.091.381.096,00	1.398.539.653.000,00	784.627.878.376,00

Sumber: Data yang diolah, 2018

Hasil Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, nilai residual yang ditunjukkan pada awalnya tidak terdistribusi normal, kemudian dilakukan beberapa cara untuk mengatasi masalah ketidaknormalan pada nilai residual tersebut. Cara yang dilakukan dalam penelitian ini agar nilai residual menjadi terdistribusi secara normal adalah dengan mendeteksi data outliers menggunakan SPSS dari seluruh sampel yang digunakan. Setelah mengeluarkan data outliers, sebanyak 9 data kemudian variabel dependen yaitu tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah tersebut diuji normalitas dengan menggunakan rumus LEARN (LN) untuk mengetahui nilai residual akhir.

Tabel 4.3
Uji KolmogorovSmirnov

		Unstandardized Residual
N		201
Normal Parameters	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.18784919
	Absolute	.084
	Positive	.084
	Negative	-.065
Kolmogorov-Smirnov Z		1.185
Asymp. Sig. (2-tailed)		.120

Sumber: Data yang diolah, 2018

Dengan melihat tabel nilai K-S untuk variabel dependen KKD yaitu 1,185 dengan tingkat probabilitas signifikansi 0,120 yang artinya memiliki nilai lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha=0,05$ atau $> 5\%$, hal ini menunjukkan bahwa hipotesis nol tidak dapat ditolak atau data terdistribusi normal.

Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary

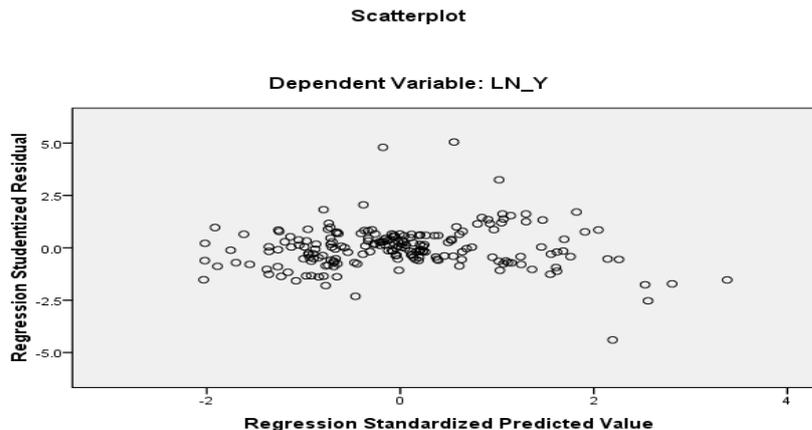
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.883a	.779	.775	.18927	1.862

Sumber : Data yang diolah, 2018

Tabel 4.4 menunjukkan Nilai DW sebesar 1,862, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan signifikansi 5%, dengan jumlah variabel independen 3 ($k=3$) dan jumlah sampel 201 (n). Nilai DW yang diperoleh sebesar 1,862 lebih besar dari batas atas (du) 1,799 dan kurang dari 2,201 ($4-du$), maka dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi karena memiliki nilai Durbin-Watson diantara 1,799 dan 2,201.

Hasil Uji Heterokedasitas

Gambar 4.2
Hasil Uji Heterokedasitas



Sumber : Data yang diolah, 2018

Hasil yang terlihat pada gambar 4.2 diatas merupakan hasil gambaran scatterplots yang menunjukkan signifikansi seluruh variabel independen yaitu PAD, DAU, dan Belanja Modal karena memiliki persebaran titik-titik diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y sehingga tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedasitas pada model regresi, sehingga model regresi ini layak digunakan.

Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized		Standardized		Collinearity			
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	-1.635	.050		-32.953	.000		
	PAD	4.085E-12	.000	1.101	23.985	.000	.533	1.877
	DAU	-1.213E-12	.000	-.728	-16.091	.000	.548	1.824
	BM	-2.508E-13	.000	-.084	-1.737	.084	.478	2.092

Sumber: Data yang diolah, 2018

Berdasarkan tampilan tabel 4.5 diatas, menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yaitu PAD, DAU, dan Belanja modal (BM) memiliki angka Variance Inflation Factors (VIF) di bawah 10 yang masing-masing sebesar PAD (1,877), DAU (1,824), dan BM (2,092) dengan angka tolerance yang menunjukkan nilai lebih dari 0,10 yang masing-masing sebesar PAD (0,533), DAU (0,548), dan BM (0,478). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang terbentuk tidak terdapat adanya gejala multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.7
Hasil Uji T Model Regresi
Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	-1.635	.050		-32.953	.000
	PAD	4.085E-12	.000	1.101	23.985	.000
	DAU	-1.213E-12	.000	-.728	-16.091	.000
	BM	-2.508E-13	.000	-.084	-1.737	.084

Sumber : Data yang diolah, 2018

Hasil model regresi uji T statistik dapat ditulis dalam persamaan di bawah ini:

$$\text{Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah} = -1,635 + 4.085E-12\text{PAD} + (-1.213E-12\text{DAU}) + -2.508E-13\text{BM}$$

Persamaan tersebut mengandung pengertian yaitu:

Nilai Konstanta pada penelitian ini sebesar -1,635 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel independen yang dianggap konstan ($X_1=0, X_2=0$), maka tingkat kemandirian keuangan tiap daerah sebesar -1,635. Koefisien regresi PAD bernilai positif sebesar 4.085E-12 atau 0,000000004085 terhadap variabel dependen. Koefisien regresi DAU bernilai negatif sebesar -1.213E-12 atau -0.000000000001213 terhadap variabel dependen. Koefisien regresi BM bernilai negatif sebesar -2.508E-13 atau -0,000000000002508 terhadap variabel dependen.

Uji F

Tabel 4.6
Uji F Model Regresi
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	24.853	3	8.284	231.246	.000 ^a
	Residual	7.057	197	.036		

Sumber : Data yang diolah, 2018

Jika dilihat dari tampilan tabel 4.6 diatas, bahwa hasil uji F menunjukkan nilai F yang di hitung adalah sebesar 231,246 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Sementara F tabel telah diketahui adalah sebesar 2,65. Hal ini memiliki arti bahwa model regresi layak dan dapat digunakan dalam penelitian ini karena Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Uji T

Tabel 4.9
Uji Hipotesis

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	-1.635	.050		-32.953	.000
	PAD	4.085E-12	.000	1.101	23.985	.000
	DAU	-1.213E-12	.000	-.728	-16.091	.000
	BM	-2.508E-13	.000	-.084	-1.737	.084

Sumber: Data yang diolah, 2018

Tabel 4.9 menunjukkan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini yang memiliki output yaitu sebagai berikut:

Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pada tabel 4.8 dan tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai signifikansi PAD sebesar 0,000 lebih kecil dari signifikan 0,05 dengan nilai t sebesar 23,985 yang berarti bahwa hipotesis pertama diterima. Hasil pengujian dalam penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariani (2010) dan Muliana (2009) hasilnya menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pada tabel 4.8 dan tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai signifikansi DAU sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai t sebesar -16,091 yang berarti bahwa hipotesis kedua diterima. Dengan demikian, hasil tersebut mengindikasikan adanya hubungan yang berbanding terbalik antara DAU dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, jika DAU suatu daerah mengalami peningkatan maka tingkat kemandirian keuangan daerah akan mengalami penurunan dan sebaliknya. Hasil pengujian dalam penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2015) yang menguji pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap tingkat kemandirian keuangan suatu daerah dan mendapatkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dalam hal kemandirian daerah.

Hubungan Belanja Modal (BM) dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pada tabel 4.8 dan tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai signifikansi Belanja Modal adalah sebesar 0,084 dimana lebih tinggi dari 0,05 dengan nilai t sebesar -1,737 yang menunjukkan bahwa hipotesis ketiga ditolak. Hasil hipotesis ini juga dibuktikan dari kinerja pegawai pemerintah daerah yang tidak maksimal dan lebih cenderung melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan anggaran belanja modal tersebut untuk kepentingan pribadi. Seperti yang dilakukan oleh anggota DPRD kota Salatiga ini dijadikan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS). Jika dilihat dari LKPD yang dipublikasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan mengenai anggaran belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2012-2017 menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran belanja modal banyak digunakan untuk perbaikan dan pembangunan gedung, peralatan, mesin, persediaan air bagi dinas dan kebutuhan aparatur daerah dibandingkan untuk membangun dan memperbaiki sarana pelayanan publik seperti pemberian modal, pelatihan sumber daya manusia, pembangunan pasar tradisional.

Koefisien Determinasi (*Adjusted R2*)

Tabel 4.8
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.883a	.779	.775	.18927

Sumber : data yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil hitung pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai adjusted R2 sebesar 0,775 hal ini berarti sebanyak 77,5% variasi dari ketiga variabel independen yaitu PAD, DAU dan Belanja Modal menjelaskan variasi variabel dependennya yaitu tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan sisanya yaitu $100\% - 77,5\% = 22,5\%$, sebesar 22,5% tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variabel independen lain diluar model.

KESIMPULAN

Dari hasil analisa dan pembahasan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pendapatan Asli

Daerah memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan maka Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah juga akan meningkat begitu juga sebaliknya, 2) Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diterima daerah maka Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah akan menurun begitu juga sebaliknya karena sebab Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat, 3) Belanja Modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan maupun penurunan alokasi Belanja Modal suatu daerah maka tidak mempengaruhi perubahan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil ini tidak mendukung pernyataan hipotesis ketiga.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya: 1) Periode yang digunakan dalam penelitian memiliki rentang waktu hanya selama 6 tahun, 2) Identifikasi variabel independen yang mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan daerah dalam penelitian ini dibatasi hanya dengan tiga variabel independen, 3) Fokus sampel dalam penelitian ini hanya menguji kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah, tidak menguji kabupaten dan kota Provinsi lainnya sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi karena ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian masih terlalu sempit.

Berdasarkan pertimbangan dari kesimpulan, dan keterbatasan yang diuraikan pada penelitian ini, maka peneliti memberikan saran untuk beberapa pihak, yaitu:

a. Bagi Penelitian selanjutnya: 1) Sebaiknya dapat meneliti dengan menggunakan variabel lain (SILPA, luas wilayah, kepadatan penduduk), 2) Menambah rentang periode penelitian sehingga data yang diperoleh lebih akurat agar perbandingan dapat dilakukan secara detail, 3) Memperluas lingkup sampel yang diteliti tidak terbatas hanya pada kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah.

b. Bagi Pemerintah Daerah: 1) Sebaiknya pemerintah daerah lebih mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di daerahnya sendiri agar pendapatan asli daerah dapat meningkat sehingga pemerintah daerah mampu mandiri dalam mengelola daerahnya, karena rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah masih tergolong rendah sekali, 2) Pemerintah daerah harus mampu merealisasikan dana transfer dan anggaran belanja modal untuk memaksimalkan anggaran dalam kegiatan yang dapat mendukung dan menambah penerimaan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pemberian modal bagi umkm, dsb

REFERENSI

- Abdullah., Dwi Asmawanti, dan Febriansyah. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Ilmiah*, Vol.41, No.3, Oktober 2015. Akuntansi FEB Universitas Bengkulu.
- Ariani, Kurnia Rina. 2010. "Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Tax Effort (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Surakarta)". Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan IBM SPSS 21*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2002. "Akuntansi Keuangan Daerah". Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- _____. 2004. "Akuntansi Sektor Publik". Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Hidayat, Mochamad Fajar. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah*. FEB Universitas Brawijaya. Malang.

- Juliawati, Ebit., Darwanis, dan Jalaluddin. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah. Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.*
- Marizka, Rizka. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah. Universitas Negeri Padang. Sumatera Barat.*
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Penerbit Andi.*
- Mahmudi. 2010. "Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". Yogyakarta : UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Muliana. 2009. Pengaruh Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Prakasa, Febrian Dwi. 2014. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Di Kabupaten Kota Jawa Timur Tahun 2008-2012). *Jurnal ilmiah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang.*
- Putri, Evrintia Dini. 2015. Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang.*
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- _____. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
- _____. 2004. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- _____. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan.
- Ristanti, Y. D. dan Handoyo, E. 2017. Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Riset Akutansi Keuangan, Vol.2, No.2. Universitas Negeri Semarang.*
- Sari, Putri Ika. 2015. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Tingkat INKAT Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di DIY periode 2007-2014). *Jurnal Ilmiah. Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Yogyakarta.*
- Verginia, Monica. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Tugas Akhir. Politeknik Negeri Padang.*



Wenny, Cherrya Dhia. 2012. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah*, Vol. 2, No. 1, hal. 39-51. STIE MDP.